

LAPORAN | 2019

PELAKSANAAN
KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU



Jalan Depati Said No. 1 Kelurahan Tapak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau



pn.lubuklinggau@yahoo.co.id (0733) 321570 <http://pn-lubuklinggau.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2019 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama tahun 2019. Laporan ini disusun sesuai dengan Sistematika Penulisan Laporan yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2019, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan.

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri
Lubuklinggau

Sekretaris
Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Mimi Haryani, SH
NIP 196711291992121001

Ponijan, SH
NIP 197105251993031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar/Bagan.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ADMINISTRASI PERKARA	4
A. KEADAAN PERKARA	4
B. PENYELESAIAN PERKARA	5
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	6
A. Komposisi Sumber Daya Manusia	6
B. Mutasi	7
C. Promosi	7
D. Pensiun	8
E. Pendidikan dan Pelatihan	8
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & TI	9
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	9
1. DIPA Badan Urusan Administrasi	9
2. DIPA Dirjen Badilum.....	10
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	10
1. Gedung dan Bangunan	10
2. Rumah Dinas.....	14
3. Kendaraan Bermotor.....	14
4. Fasilitas Perkantoran	14
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	15
BAB V PENGAWASAN	16
A. INTERNAL	17
B. EVALUASI	18
BAB VI PENUTUP	20
A. KESIMPULAN	20
B. SARAN.....	21

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Rekapitulasi Perkara Berdasarkan Klasifikasi Perkara	4
Tabel 2.2	Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Tahun 2019	5
Tabel 3.1	Daftar Nama Seluruh Personil Pengadilan Negeri Lubuklinggau	6
Tabel 3.2	Daftar Mutasi Tahun 2019	7
Tabel 3.3	Daftar Promosi Tahun 2019.....	7
Tabel 3.4	Daftar Pensiun Tahun 2019	8
Tabel 3.5	Daftar Pegawai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2019	8
Tabel 4.1	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2019.....	9
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2019.....	9
Tabel 4.3	Gedung & Bangunan	11
Tabel 4.4	Daftar Rumah Dinas Pengadilan Negeri Lubuklinggau	14
Tabel 4.5	Daftar Kendaraan Bermotor Pengadilan Negeri Lubuklinggau	14
Tabel 4.6	Daftar Fasilitas Perkantoran	15
Tabel 4.7	Dukungan Teknologi Informasi	15
Tabel 5.1	Daftar Hakim Pengawas Bidang	16

BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut di atas administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan dengan cakupan wilayah hukum meliputi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuklinggau Yang Agung”**. Dalam upaya

untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menyusun beberapa misi antara lain :

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Standar.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan dipertanggung-jawabkan secara periodik yang dikenal pada tahun yang sudah berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan penjabaran dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama, Dengan demikian untuk peningkatan kinerja badan Peradilan umum perlu ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang Handal dan tepat guna dan juga mempunyai kualitas keterampilan individu (*skill individual*) yang baik, sehingga jalannya suatu organisasi dapat juga selaras dan berkesinambungan sesuai dengan pedoman yang telah menjadi Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka dibuatlah program kerja yang mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal yang bersifat non teknis

misalnya sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau terangkum dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019.

BAB II

ADMINISTRASI PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan Pengadilan Negeri Kelas 1B yang wilayah yurisdiksinya meliputi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara. Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki wewenang untuk mengadili perkara Perdata Gugatan dan Permohonan. Sedangkan untuk perkara Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau mempunyai wewenang untuk mengadili Perkara Pidana antara lain Pidana Biasa, Pidana Cepat, Pidana Singkat dan Pidana Khusus Anak.

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Lubuklinggau menangani banyak jenis perkara. Perkara Pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2019 banyak didominasi oleh jenis perkara Narkotika dan pencurian. Berikut daftar jumlah perkara berdasarkan jenis perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau sepanjang tahun 2019.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Perkara Tahun 2019 Berdasarkan Klasifikasi Perkara

No.	Klasifikasi Perkara	Jumlah
1.	Narkotika	676
2.	Pencurian	649
3.	Penggelapan	174
4.	Penganiayaan	113
5.	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	106
6.	Kejahatan terhadap Nyawa	77
7.	Perlindungan Anak	72
8.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
9.	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	40
10.	Kejahatan Perjudian	38
11.	Pemerasan dan Pengancaman	21
12.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	18
13.	Penipuan	15
14.	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	15
15.	Lain-Lain	9

16.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	8
17.	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	7
18.	Lalu Lintas	7
19.	Perbuatan Curang	6
20.	Kebakaran Hutan	5
21.	Pemalsuan Surat	4
22.	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	4
23.	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	3
24.	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	2
25.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	1

B. PENYELESAIAN PERKARA

Pada awal tahun 2019 Pengadilan Negeri Lubuklinggau memprioritaskan penyelesaian perkara tahun lalu yang menjadi tunggakan atau belum terselesaikan tanpa mengesampingkan kualitas putusan. Keadaan perkara Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Tahun 2019

Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa	Diputus Tepat Waktu	Perkara Yang Tidak Upaya Hukum	Berhasil Diversi/ Mediasi
Pidana Umum							
Pidana Biasa	128	824	815	137	815	784	
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0	
Pidana Cepat	0	8	8	0	8	8	
Lalulintas	0	12.691	12.691	0	12.691	12.691	
Pra Peradilan	0	2	2	0	2	2	
Pidana Khusus							
Pidana Anak	2	70	68	4	68	68	2
Perdata							
Gugatan	14	35	34	15	23	23	4
Gugatan Sederhana	0	15	15	0	15	15	
Permohonan	0	80	73	3	73	77	

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau hingga laporan ini dibuat mempunyai total 41 personil yang terdiri dari 14 Orang Hakim, 27 Orang Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Daftar Nama seluruh personil Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Mimi Haryani, SH	Ketua Pengadilan	
2.	Imam Santoso, SH	Wakil Ketua	
3.	Siti Yuristiya Akuan SH.,MH.	Hakim	
4.	Tatap Urasima Situngkir, SH	Hakim	
5.	Indra Lesmana Karim, SH	Hakim	
6.	Dian Triastuty, SH	Hakim	
7.	Hendri Agustian, SH., M.Hum	Hakim	
8.	Ferdinaldo H. Bonodikun, SH	Hakim	
9.	Andi Barkan, SH., MH	Hakim	
10.	Syahreza Papelma, SH., MH	Hakim	
11.	Yopy Wijaya, SH	Hakim	
12.	Yulia Marhaena, SH.	Hakim	
13.	Nasib Sagala, SH	Panitera	
14.	Ponijan, SH	Sekretaris	
15.	Zainal Abidin Kamal, S.Sos	Panitera Muda Perdata	
16.	Harmen, SH	Panitera Muda Pidana	
17.	Helni Aryadi, SH., MH	Panitera Muda Hukum	
18.	Rusmiati	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	
19.	Mulyati, S.Sos.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
20.	Anderiansyah, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
21.	Marlinawati	Panitera Pengganti	
22.	Alkautsari Dewi Adha, A.Md	Panitera Pengganti	
23.	Boy Hendra Kusuma, SH	Panitera Pengganti	
24.	Ahmad Irfansyah, SH	Panitera Pengganti	
25.	Rahmad Wahyudi, SH	Panitera Pengganti	
26.	Emi Huzaimah, A.Md	Panitera Pengganti	
27.	Edi Sfendi	Jurusita	
28.	Rusman Edwar, S.Kom	Jurusita	
29.	Yosrizal	Jurusita Pengganti	

30.	Syamsiah Dusu	Jurusita Pengganti	
31.	Roby Pratama, A.Md	Jurusita Pengganti	
32.	Dewi Seiawati, SH., MH	Pelaksana	
33.	RR. Shandy Satyo Asih, SE	Pelaksana	
34.	Sariyan	Pelaksana	
35.	Leni Sartika, A.Md	Pelaksana	
36.	Ardi	Pelaksana	
37.	Roli Rahmadya, A.Md	Pelaksana	
38.	Riska Gita Anggraini, SH	Pelaksana/CPNS	
39.	Sarah Attachira, A.Md	Pelaksana/CPNS	

B. Mutasi

Selama tahun 2019 terdapat beberapa mutasi Hakim dan pegawai baik mutasi masuk maupun mutasi keluar, mutasi tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Mutasi Tahun 2019

No	Nama	Jenis Mutasi	Jabatan/ Satuan Kerja Asal	Jabatan/ Satuan Kerja Tujuan
1.	Nasib Sagala, SH	Masuk	Panitera PN Bangko	Panitera PN Lubuklinggau
2.	Yulia Marhaena, SH.	Masuk	Hakim PN Kepahiang	Hakim PN Lubuklinggau

C. Promosi

Selama tahun 2019 terdapat 1 orang yang mendapatkan promosi di Kepaniteraan (teknis).

Tabel 3.3
Daftar Promosi Tahun 2019

No	Nama	Jabatan Lama/ Satuan Kerja Asal	Jabatan Baru/ Satuan Kerja Tujuan
1.	Mimi Haryani, SH	Wakil Ketua PN Lubuklinggau	Ketua PN Lubuklinggau
2.	Emi Huzaimah, A.Md	Pelaksana PN Lubuklinggau	Panitera Pengganti PN Lubuklinggau

D. Pensiun

Dalam kurun waktu dari Januari s/d Desember 2019 terdapat 1 Orang yang pensiun.

Tabel 3.4
Daftar Pensiun Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	Pangkat Golongan/ Ruang	Ket
1.	Bakri	Staf Umum dan Keuangan	Pengatur II/c	Periode Januari 2019

E. Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2019 terdapat 2 orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan.

Tabel 3.5
Pegawai yang mengikuti diklat tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	Nama Diklat	Ket
1.	Ponijan, SH	Sekretaris	PIM III Angkatan XIV & Angkatan XV Tahun Anggaran 2019	27 Jan 2019 s/d 10 Mei 2019
2.	Syahreza Papelma, SH., MH	Hakim	Sertifikasi Hakim Mediator Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	18 Feb 2019 s/d 06 Maret 2019
3.	Yopy Wijaya, SH	Hakim	Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak	7 Apr 2019 s/d 17 Apr 2019
4.	Imam Santoso, SH	Wakil Ketua	Bekerja Dengan Media	2 Des 2019 s/d 6 Des 2019

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA SERTA TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Anggaran keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau sering dikenal dengan DIPA. Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2020 memiliki 2 DIPA, yakni DIPA Badan Urusan Administrasi dengan Nomor : DIPA-005.01.2.098970/2019 dengan total pagu Rp. 6.232.721.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : DIPA-005.03.2.099229/2018 dengan total pagu Rp. 486.300.000,- (Empat Ratu Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

DIPA Badan Urusan Administrasi meliputi anggaran belanja gaji pegawai, belanja barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional dan belanja modal. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2019.

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	1066.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker				
2.	051	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)	27.420.000	27.269.800	150.200	99.45
3.	1066.994	Layanan Perkantoran [Base Line]				
4.	001	Gaji dan Tunjangan	4.863.778.000	4.897.784.467	-34.006.467	100.70
5.	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.119.523.000	1.070.480.731	49.042.269	95.62
6.	1071.951	Layanan Internal (<i>Overhead</i>) [Base Line]				
7.	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	61.600.000	61.469.200	130.800	99.78
8.	053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	160.400.000	158.000.000	2.400.000	98.50
Total			6.232.721.000	6.215.004.198	17.716.802	99.72

2. DIPA Dirjen Badilum (03)

DIPA Dirjen Badilum meliputi anggaran belanja Pos Bantuan Hukum dan Penyelesaian perkara di tingkat pertama. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2019.

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum [Base Line]				
2.	051	Pos Bantuan Hukum	48.000.000	40.800.000	7.200.000	85.00
3.	1049.005	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH PALEMBANG				
4.	051	Pendaftaran Berkas Perkara	162.000.000	161.980.000	20.000	99.9
5.	052	Penetapan Majelis Hakim, PP dan Hari Sidang	45.000.000	44.550.000	450.000	99.0
6.	053	Pemeriksaan Disidang Pengadilan	78.300.000	77.800.800	499.200	99.3
7.	054	Minutasi	40.500.000	33.601.300	6.899.500	82.9
8.	055	Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU & Terdakwa	45.000.000	44.700.000	300.000	99.3
9.	056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	45.000.000	44.550.000	450.000	99.0
10.	057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	14.250.000	7.800.000	6.450.000	54.7
11.	058	Penanganan Perkara Kasasi & PK	8.250.000	2.100.000	6.150.000	25.4
Total			486.300.000	457.881.300	28.418.700	94.1

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan dan memanfaatkan sarana dan prasarana agar tetap dalam kondisi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau meliputi Gedung dan Bangunan, Tanah, Kendaraan Bermotor serta fasilitas perkantoran.

1. Gedung dan Bangunan

Tabel 4.3
Gedung & Bangunan

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
1	GEDUNG KANTOR	Tanah Gedung Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Tanah 4.530 M² - Sertifikat Hak Pakai Nomor 09 / Sidorejo Tahun 1988 An. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia
		Bangunan Gedung Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Dibangun Tahun 1974 - Luas Bangunan 1.120 M² - Belum Prototipe (Sedang Dilakukan Pembangunan) - Alamat Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
2	RUANG KERJA	Ruang Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 35 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 32M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Hakim	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 96 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Panitera	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 32 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Panitera Muda	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 54 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Panitera Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 30 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Juru sita dan Juru Sita Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 30 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 12 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Kepala Sub Bagian	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 12 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 12M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Jaksa Penuntut Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 12M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Penasihat Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 12M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Rapat	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 28M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 54 M² - Terdapat 7.750 Buah Koleksi Buku - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Arsip	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 60 M² - Dilengkapi Dengan Komputer Untuk Pengarsipan Secara Elektronik - Dilengkapi Rak Arsip Terbuat Dari Besi/Metal - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Gudang	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 60 M²
Ruang Server	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 4 M² 		

			<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Poliklinik	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 9 M² - Dilengkapi dengan Obat-Obatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Toilet Pegawai Pria	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 Unit - Ukuran Masing-Masing 6 M²
		Ruang Toilet Pegawai Wanita	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 Unit - Ukuran Masing-Masing 6 M²
		Ruang Tamu Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pada Bagian Depan Gedung (Lobi) - Dilengkapi Dengan Sofa - Ruangan Terbuka (Tidak Tertutup) - Sesuai dengan SE Dirjen Badilum Nomor 1/DJU/SE/V/2012 Tentang Penyediaan Ruang Tamu Terbuka Pada Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia
3	SARANA LINGKUNGAN GEDUNG KANTOR	Pagar Keliling	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang Pagar 286 M - Tinggi ± 3 Meter - Terbuat dari Beton (Batu Bata)
		Pos Jaga	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 6 M² - Terdapat pada bagian depan Gedung kantor
		Tempat Parkir Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 area parkir yaitu parkir Kendaraan Roda 2 dan Roda 4
		Akses Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengerasan Jalan Menggunakan <i>Paving Block</i>
		Taman	<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan Bunga dan Pohon Hias - Terdapat Kolam Ikan Koi
		Akses Difabel	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat jalur Khusus untuk penyandang disabilitas - Terdapat Step (Ram) pada Lobi Kantor untuk penyandang disabilitas yang menggunakan Kursi Roda
		Kamera Keamanan (CCTV)	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 16 Titik Kamera CCTV <i>Full HD</i>
4	RUANG PELAYANAN	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 96 M² - Terletak di Bagian Gedung Kantor (Lobi Gedung) - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Televisi - Dilengkapi Dengan Media Informasi - Dilengkapi Dengan Komputer Untuk Proses Pelayanan - Dilengkapi Dengan Kursi Tunggu - Dilengkapi Dengan Mesin Antrean - Dilengkapi Dengan WIFI untuk Pengguna Layanan - Dilengkapi Dengan Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas - Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Air Minum dan Gelas Untuk Pengguna Layanan - Dilengkapi Dengan <i>Charger Box</i>
		Loket Pembayaran (Kasir)	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 5 M² - Terdapat pada Lobi Pengadilan (satu area dengan PTSP)

		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Mesin EDC (<i>Electronic Data Capture</i>)
	Ruang Sidang	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 3 Ruang Sidang (Cakra, Candra dan Tirta) - Luas Ruangan Masing-Masing Cakra : 120 M² Candra : 70 M² Tirta : 70 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) di setiap Ruangannya - Dilengkapi Dengan sarana dan Prasarana Ruang Sidang Seperti mebel, Bendera, Lambang Garuda, Palu dan Lain-lain
	Ruang Sidang Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 1 Ruang Sidang Anak - Luas Ruangan 50 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Sesuai Dengan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 Tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak
	Ruang Tunggu Sidang	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 150 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Televisi - Dilengkapi Dengan Media Informasi - Dilengkapi Dengan Kursi Tunggu - Dilengkapi Dengan Petugas Informasi Persidangan (Konfirmasi & Antrean Sidang) - Dilengkapi Dengan WIFI untuk Pengunjung Sidang - Dilengkapi Dengan Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas - Dilengkapi Dengan Toilet Perempuan dan Laki-Laki - Dilengkapi Dengan Air Minum dan Gelas Untuk Pengguna Layanan - Dilengkapi Dengan <i>Charger Box</i>
	Ruang Pos Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 12 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
	Ruang Informasi Persidangan (Konfirmasi dan Antrean Sidang)	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 12 M² - Dilengkapi Dengan Antrean Sidang - Dilengkapi Dengan Pengeras Suara
	Ruang Tahanan Pria	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 60 M² - Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Perlengkapan Ibadah
	Ruang Tahanan Wanita	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 60 M² - Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Perlengkapan Ibadah
	Ruang Ramah & Tunggu Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 30 M² - Terpisah Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan - Dilengkapi Dengan Toilet (Laki-Laki dan Perempuan) - Dilengkapi Dengan Buku-Buku Anak dan Perlengkapan Ibadah - Sesuai Dengan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017

			Tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak
	Ruang Mediasi		- Luas Ruangan 30 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Meubelair
	Ruang Kaukus		- Luas Ruangan 30 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Meubelair
	Ruang Laktasi		- Luas Ruangan 24 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Tempat Tidur Untuk Menyusui
	Toilet Umum Pria		- Luas Ruangan 6 M ² - Terdapat 2 Toilet Pria
	Toilet Umum Wanita		- Luas Ruangan 6 M ² - Terdapat 2 Toilet Wanita
	Toilet Khusus Difabel		- Luas Ruangan 6 M ²
	Mushallah		- Luas Ruangan 45 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Tempat Wudu - Dilengkapi Dengan Pengeras Suara - Dilengkapi Dengan Peralatan Ibadah

2. Rumah Dinas

Tabel 4.4
Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1			
3.	Rumah Dinas Hakim	6			1	
4.	Rumah Dinas Panitera	1	1			
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	1			

3. Kendaraan Bermotor

Tabel 4.5
Kendaraan Bermotor

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
Kendaraan Bermotor Roda 4						
1.	Mitsubishi Pajero Sport	1	1			
2.	Toyota Kijang Inova	1		1		
3.	Nissan Terano	1		1		
4.	Mitsubishi L300	1		1		
Kendaraan Bermotor Roda 2						
1.	Honda Supra	3	3			

4. Fasilitas Perkantoran

Tabel 4.6
Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	AC Split	28	
2.	UPS	3	
3.	Camera Digital	1	
4.	PC	23	
5.	Laptop	15	
6.	Printer	19	
7.	Scanner	2	
8.	Server	2	
9.	CCTV	16	
10.	Proyektor	1	

C. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dukungan penerapan teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2019 antara lain pengadaan jaringan Internet *dedicated* 1:1 dengan *Bandwidth* sebesar 50 Mbps, Pengadaan Laptop bagi hakim dan Sewa Mesin Fotokopi guna mendukung *E-Court*. Selanjutnya Mahkamah Agung juga mengirimkan peralatan pendukung *E-Court* berupa Server, Komputer, *Kiosk* dan Juga UPS.

Tabel 4.7
Dukungan Teknologi Informasi

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Jaringan	1	<i>Dedicated</i> 1:1 50Mbps
2.	Laptop	10	Pendukung <i>E-Court</i>
3.	Server	2	Server SIPP & Aplikasi Lainnya
4.	UPS	3	

BAB V PENGAWASAN

Pengawasan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan. Terdapat 2 jenis pengawasan yakni :

1. Pengawasan Melekat

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan Fungsional

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerbitkan surat keputusan Nomor : W6.U5/79/KP.04.1/11/2019 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Hakim Pengawas Bidang

No	Nama	Bidang Pengawasan
1.	Imam Santoso, SH	Koordinator
2.	Indra Lesmana Karim, SH	Pidana
3.	Dian Triastuty, SH	Keuangan
4.	Hendri Agustian, SH., MH	Perencanaan, TI dan Pelaporan
5.	Ferdinaldo H. Bonodikun, SH., MH	Minutasi, Upaya Hukum dan Delegasi
6.	Andi Barkan Mardianto, SH., MH	Perdata & E-Court
7.	Syahreza Papelma, SH.,MH	Hukum
8.	Yopy Wijaya, SH	Umum
9.	Tatap Urasima Situngkir, SH	Kepegawaian & Ortala
10.	Siti Yuristia Akuan, SH	Umum
11.	Yulia Marhaena, SH	PTSP

Dengan surat keputusan ini diharapkan pengawasan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat berjalan dengan baik sehingga hasil dari pengawasan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan.

A. INTERNAL

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dilaksanakan secara rutin baik secara langsung yakni dengan cara melakukan pemeriksaan langsung maupun secara tidak langsung dengan cara melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen. Objek dari pengawasan yang dilakukan meliputi :

1. Manajemen Peradilan
 - a. Program kerja;
 - b. Pelaksanaan/Pencapaian Target;
 - c. Pengawasan dan Pembinaan;
 - d. Kendala dan hambatan;
 - e. Faktor-faktor pendukung;
 - f. Evaluasi kegiatan.
2. Administrasi Perkara
 - a. Prosedur penerimaan perkara;
 - b. Prosedur penerimaan permohonan banding;
 - c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi;
 - d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;
 - e. Prosedur penerimaan permohonan grasi;
 - f. Keuangan perkara;
 - g. Pemberkasian perkara dan kearsipan;
 - h. Pelaporan;
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

- a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
 - b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 - c. Minutasi perkara;
 - d. Pelaksanaan putusan (Eksekusi).
4. Administrasi Umum
- a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Inventaris;
 - d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
5. Kinerja Pelayanan Publik
- a. Pengelolaan manajemen;
 - b. Mekanisme pengawasan;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
 - g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
 - h. Tingkat pengaduan masyarakat.

Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2019 terdapat berbagai temuan, lalu dilakukan klarifikasi oleh pimpinan objek pengawasan selanjutnya berbagai temuan tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan, untuk hal yang memerlukan adanya perbaikan maka Pimpinan objek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu.

B. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua

Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing -masing hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan dapat mengetahui kendala -kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Dari evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang terbatas telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan.
2. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), walaupun masih terdapat berbagai kekurangan karena terbatasnya sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.
3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari pengawasan internal, Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Wakil Ketua dan serta jajaran Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

B. SARAN

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan, maka perlu secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas kinerja.
2. Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat diharapkan adanya penambahan pegawai pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengingat sumber daya manusia yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas.

3. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai baik teknis maupun non teknis agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.